

KONSEPSI MANUSIA INDONESIA ABAD 21 YANG BERKUALITAS TINGGI

Moch. Ichdah Asyarin Hayau Lailin

(Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan,
Universitas Islam Majapahit)

ABSTRAK

Abad 21 yang identik dengan abad globalisasi sungguh membawa perubahan dalam segala lini kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih teknologi komunikasi telah menjadikan dunia seperti lingkungan tanpa jarak walaupun dalam tataran realitas sangat jauhjaraknya. Apa yang terjadi saat ini dalam hitungan detik sudah dapat dilihat, didengar di belahan bumi yang lain. Hal ini membawa banyak perubahan dalam konsep-konsep kehidupan manusia. Konsep tentang pola pengasuhan anak, pendidikan, bekerja, memenuhi kebutuhan hidup sudah banyak bergeser. Perubahan ini harus disadari dan disikapi secara arif oleh bangsa dan masyarakat Indonesia yang tidak bisa lepas dari pengaruh globalisasi. Perubahan konsepsi manusia Indonesia yang prilakunya terbentuk pada awal kemerdekaan, era orde lama, orde baru dan kemudian era reformasi perlu mendapat perhatian serius. Kesiapan masyarakat dan pemerintah untuk menghadapi globalisasi abad 21 perlu dikaji secara mendalam. Sejarah membuktikan ketidaksiapan masyarakat menghadapi globalisasi pada akhirnya menyebabkan manjmurkan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Membentuk manusia Indonesia yang bersih, transparan dan profesional, menjadi sebuah keharusan. Upaya ini harus dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia, baik pelaksana negara, aparat pemerintah dari pusat sampai terendah, masyarakat, kaum cerdik cendekia dan profesional yang ada di Indonesia. Kalau upaya ini tidak segera dilakukan maka upaya membentuk konsep manusia Indonesia hanya sekedar harapan kosong seperti membangun rumah di atas angin semata.

Kata Kunci: *Globalisasi, Bersih, Transparan, Profesional, Self Efficacy, Learned Helplessness*

PENDAHULUAN

Kondisi sebelum abad 21 menampilkan komunikasi antar bangsa, negara, wilayah yang tidak mudah dilakukan. Banyak keterbatasan yang dihadapi, sehingga peristiwa yang terjadi di satu tempat tidaklah mudah diketahui oleh orang-

orang yang tinggal di tempat lain. Dunia terpecah pecah dalam ruang dan waktu. Kejadian yang terjadi di Amerika tidak mudah diketahui oleh orang yang berada dalam belahan bumi lain seperti Eropa, Asia, Afrika dan Australia. Dengan demikian pikiran, pandangan, gaya hidup masyarakat tertentu bersifat lokal dan

khusus.mengacu kepada kebiasaan dan budaya setempat sehingga memunculkan berbagai ragam tatanan masyarakat dan gaya hidup.

Keterbatasan komunikasi juga mengisolir peristiwa yang terjadi di wilayah tertentu. Peristiwa di Merauke Irian jaya akan lama sampai pemberitaannya di Banda Aceh. Namun berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjelang abad 21, jarak tampaknya tidak lagi menjadi masalah. Menit ini peristiwa terjadi, menit berikutnya seluruh dunia bisa mengetahuinya. Ditemukannya satelit membuat komunikasi menjadi lebih mudah. Kemudahan komunikasi inilah yang membawa penghuni dunia ke dalam kehidupan bersama, yang memungkinkan mereka saling berinteraksi, mempengaruhi, juga dalam memilih dan menentukan pandangan serta gaya hidup.

Abad 21 ditandai dengan semakin membaurnya bangsa-bangsa warga masyarakat dunia dalam satu tatanan kehidupan masyarakat luas yang beraneka ragam, tetapi sekaligus juga terbuka untuk semua warga. Gaya hidup yang menyangkut pilihan pekerjaan, kesibukan, makanan, mode pakaian dan kesenangan telah mengalami perubahan, dengan kepastian mengalirnya pengaruh kota-kota besar terhadap kota-kota kecil, bahkan sampai ke desa. Bentuk-bentuk tradisional tergeser diganti dengan gaya hidup global. Kesenangan bergaya hidup internasional mulai melanda. Perbincangan mengenai pengembangan hubungan antar negara menjadi mirip pembahasana tentang komunikasi antar kota dan desa. Tehnologi komunikasi memang memungkinkan dilakukannya pengembangan dengan siapa saja, kapan saja, dimana saja, dalam

berbagai bentuk yakni suara dan gambar yang menyajikan informasi, data, peristiwa dalam waktu sekejap. Secara psikologis kondisi tersebut membawa manusia pada perubahan petakognitif, pengembangan dan kemajemukan kebutuhan, pergeseran prioritas dalam tata nilainya.

KONDISI DAN SITUASI ABAD 21

Proses menuju abad 21 telah berlangsung sejak tahun tujuh puluhan. Dalam percaturan internasional tak ada yang bisa menghindar atau mengelakkan diri dari proses ini. Pengaruh yang datang tak lagi bisa dibendung, mengalir deras tanpa kenal batas. Film, surat kabar, majalah, radio, televisi gencar menyuguhkan pemikiran, sikap, perilaku yang sebelumnya tidak dikenal. Gaya hidup baru yang diberi label 'modern' diperkenalkan secara luas. *Naisbitt dan Aburdene* (1990) sebagaimana dikutip oleh Sri Mulyani Martaniah (2011) mengatakan bahwa era globalisasi memungkinkan timbulnya gaya hidup global. Tumbuhnya restoran dengan menu khusus mancanegara semakin menjamur, menggeser selera masyarakat yang semula bertumpu pada resep-resep tradisional. Gaya berpakaian dipengaruhi oleh garis-garis mode yang diciptakan oleh perancang kelas dunia. Kosmetika, aksesoris dan pernak-pernik untuk melengkapi penampilan yang tidak lepas dari era globalisasi, seperti halnya tata busana. Selain mode, dunia hiburan juga tersentuh, munculnya kafe, klub malam, rumah bola memberi warna baru dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula kegiatan pasar. Bentuk-bentuk pasar tradisional yang memungkinkan terjadinya keakraban antara penjual dan pembeli, sehingga keterlibatan emosional ikut

mewarnai, perlahan menghilang dan berganti dengan transaksi ekonomi semata ketika muncul pasar swalayan

Seiring dengan perubahan jaman, masyarakat pun mengembangkan norma-norma, pandangan dan kebiasaan baru dalam berperilaku. Era globalisasi yang mewarnai abad 21 telah memunculkan pandangan baru tentang arti bekerja. Ada yang lebih luas dari sekedar mencari nafkah dan ukuran kecukupan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Orang cenderung mengejar kesempatan untuk memuaskan kebutuhan aktualisasi diri, sekaligus tampil sebagai pemenang dalam persaingan untuk memperoleh yang *terbaik, tertinggi, terbanyak*. Kebutuhan ini sangat terasa dan harus ditopang dukungan ekonomi yang tinggi. Tawaran gaya hidup modern yang ditawarkan melalui kaca-kaca ruang pameran toko atau distributor benda-benda yang digandrungi masyarakat telah memacu banyak orang untuk bekerja tak kenal waktu. Apalagi media massa juga rajin menggelitik masyarakat untuk mengikutinya, antara lain melalui iklan, sinetron, acara hiburan dan sebagainya.

Kemajuan teknologi komunikasi abad ini telah memungkinkan berita dan cerita segera menyebar ke seluruh pelosok, menyapa siapa saja, tak peduli penerima pesannya siap atau tidak, Wajah keluarga juga berubah, Perkembangan jaman yang mengubah gaya hidup masyarakat ikut mewarnai kehidupan keluarga. Peran suami, istri, pola asuh dan pendidikan anak tidak bisa mempertahankan pola lama sepenuhnya. Pengaruh yang diterima suami, istri juga yang diterima maka dalam perkembangannya tidak bisa dipisahkan lagi dari dunia diluarnya.

Melalui perangkat teknologi anak bisa langsung menerima pengaruh dari luar yang tentu saja akan mempunyai dua sisi, baik dan tidak baik, positif dan negatif. Orangtua tak lagi menjadi pewarna tunggal dalam perkembangan pola sikap dan tingkah laku anak. Ada lingkungan yang lebih luas dan leluasa memasuki kehidupan keluarga dalam menawarkan berbagai bentuk perilaku untuk diamati, dipilih dan diambil alih anak. Teman dan pesaing orangtua menjadi bertambah, sebab lingkungan memang tidak hanya terdiri dari dukungan atau penguat pesan-pesan dari nilai yang ditanamkan orangtua, tetapi juga menjadi penghambat dan pengganggu penerimaan pesan dan nilai tersebut.

Perkembangan kehidupan keluarga yang mewarnai abad 21 memunculkan penampilan ibu yang berbeda peran dan fungsinya selaku penyelenggara rumah tangga dan pendidik anak. Seiring dengan pemunculan ibu dalam kegiatan luar rumah (bekerja, melakukan kegiatan sosial-budaya) yang tidak lagi 24 jam di rumah sering menimbulkan pertanyaan tentang hasil yang bisa diharapkan dari pola asuhan dan pendidikan dalam situasi seperti ini? Apa jadinya setelah ibu juga sibuk diluar, padahal ibu dikenal selaku *pendidik pertama dan utama*? Kalau ibu tidak ada, siapa yang ditunjuk dan disertai tanggungjawab sebagai pengganti? Pertanyaan ini menjadi lebih bermakna karena ayah tidak juga menjadi surut dalam kegiatannya di luar rumah, bahkan cenderung meningkat seiring dengan tuntutan kebutuhan kehidupan abad 21. Padahal kehadiran itu sangat diperlukan anak, tak peduli berapapun umurnya, sebab proses pendidikan berlangsung selama masa perkembangannya sejak kanak-kanak sampai dewasa.

Mencari pengganti ibu tampaknya menjadi masalah yang akan mewarnai abad 21. Tidak mudah memperoleh pengasuh anak, karena hampir tidak ada ada pengasuh anak dalam keluarga yang bisa membantu ibu dan berperan turun temurun dari generasi ke generasi seperti yang pernah dialami pada era sebelumnya. Unsur kesetiaan dan pengabdian telah berubah menjadi transaksi ekonomi sekedar menjual dan memakai jasa. Sementara itu gagasan untuk mengatasi masalah ini dengan mendirikan TPA (Tempat Penitipan Anak) masih memerlukan banyak pengkajian dan pertimbangan.

Masalah pendidikan anak pada abad 21 perlu disikapi sungguh-sungguh mulai sekarang. Bekal anak untuk tumbuh dan berkembang sebagai sosok pribadi yang sehat jasmani dan rohani, tangguh dan mandiri serta mampu beradaptasi dalam era globalisasi menjadi semakin perlu diperhatikan kualitasnya. Kondisi abad 21 memberi peluang bangsa-bangsa di dunia untuk saling berinteraksi, sekaligus membawa ke suasana kompetisi atau persaingan yang semakin ketat dalam memperoleh kesempatan untuk mengisi kehidupan dan membuatnya lebih bermakna (bisa sekolah, bisa bekerja, bisa mencari nafkah, dsb). Persaingan ini memerlukan ketangguhan dan keuletan untuk menghadapinya. Kebutuhan untuk menjadi seseorang dan menjadi bagian yang jelas kedudukannya bisa menjadi landasan untuk menumbuhkan motivasi pengembangan diri dan kemampuan beradaptasi. Kebutuhan ini erat kaitannya dengan pembentukan rasa percaya diri dan menumbuhkan motivasi untuk berusaha dan meraih kesempatan agar dapat senantiasa meningkatkan diri. Sikap

yang mandiri, tak gentar menghadapi tantangan, mampu berpikir kreatif dan bertindak inovatif tapi juga peduli lingkungan adalah sosok yang diperlukan untuk menjalani kehidupan era globalisasi. Kemampuan mengantisipasi masa depan dengan berbagai alternatif untuk mengatasi permasalahannya menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Situasi ini tidak hanya merupakan masalah keluarga, melainkan juga seluruh pendukung proses pendidikan anak, yaitu masyarakat, bangsa dan negara.

PERILAKU MANUSIA INDONESIA

1. Kehidupan masyarakat pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945

Kehidupan berbangsa dan bernegara mempengaruhi pembentukan pola perilaku masyarakat yang tercermin dari perilaku individu selaku anggota masyarakat. Sebagai bangsa yang bangkit dari penjajahan (Belanda dan Jepang) di awal kemerdekaan, manusia Indonesia mengembangkan perilaku penuh gairah membangun bangsa dan negara. Kebanggaan menyandang identitas sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat penuh mendorong terjadinya interaksi yang saling mengisi antar berbagai suku bangsa dalam semangat kesatuan dan persatuan yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada kebutuhan untuk saling mengenal, memahami dan menghayati agar kesatuan dan persatuan tidak sekedar simbol, melainkan merasuk dalam kehidupan sehari-hari.

Kebanggaan dan cita-cita mempertahankan kemerdekaan serta keinginan untuk tampil sebagai bangsa

yang dikenal dan dihormati dalam percaturan dunia telah membawa masyarakat dalam mengembangkan perilaku kebersamaan yang cenderung tidak mempertajam perbedaan latarbelakang suku, pendidikan, agama dan sebagainya.. Ada kebutuhan yang ditumbuhkan untuk memotivasi masyarakat agar dapat tampil sebagai orang Indonesia sebagai identitas diri yang baru dengan tetap mempertahankan latar belakang warna suku bangsanya. Dengan falsafah gotong royong, semangat persatuan dan kesatuan, pembangunan bangsa dan negara mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.

2. Pembentukan perilaku manusia Indonesia dalam masa Orde Baru

Peristiwa di tahun 1965 (pembubaran PKI) kemudian memunculkan arah baru dalam pembentukan perilaku manusia Indonesia. Masa yang dikenal dengan orde baru mengarahkan pembangunan di bidang ekonomi sebagai fokus utama. Masyarakatpun berpaling. Segenap lapisan berusaha mengikuti derap pembangunan yang baru, sesuai dengan kemampuan dan harapannya. Sejalan dengan perkembangan ini maka sikap dan gaya hidup masyarakatpun berubah. Manusia Indonesia seolah dipaksa masuk ke dalam persaingan global yang berciri khas kapitalisme. Para pengusaha siap menjelajah seluruh pelosok dan menelan siapa saja untuk mencapai tujuan dan laba yang ingin diraih. Salah satu aspek ekspansi kapitalisme global adalah diciptakannya manusia-manusia yang serakah dan materialistis sesuai dengan yang dibutuhkan dalam sistem kapitalisme. Produksi akan macet kalau manusia

merasa sudah cukup dan tidak berkonsumsi lagi. Akibatnya melalui iklan dan berbagai bentuk promosi lainnya manusia dibentuk berperilaku konsumeristis. Sikap serakah, materialistis dan konsumerisme mendorong orang bekerja sekeras-kerasnya, demi memenuhi keinginannya yang tak kunjung terpuaskan. Kekayaan menjadi simbol status dalam sistem kapitalis, Ukuran tidak lagi pada kualitas manusianya, melainkan pada jumlah atau kuantitas hartanya, kejujuran tak lagi menjadi ukuran keluhuran perilaku. *Orang yang jujur tapi miskin tampak bodoh dibanding orang yang kaya meski tidak jujur.*

Sisi lain dari pengembangan sistem kapitalis adalah ditimbulkannya semangat individualistis, baik dalam berkonsumsi maupun berproduksi. Kolektivitas dan solidaritas dianggap tidak rasional. Kemampuan berkompetisi untuk meraih yang terbanyak, tertinggi lalu berkonsumsi dalam jumlah banyak untuk meraih simbol status adalah tuntutan untuk bisa masuk dan bertahan dalam kehidupan sistem kapitalis. Akhirnya kapitalisme tidak hanya dalam sistem perekonomian belaka, tetapi sudah mencampuri nilai-nilai kehidupan dan menentukan arah tujuan hidup. Suasana pemerintahan orde baru diwarnai oleh kondisi seperti ini. Upaya menciptakan manusia yang materialistis, individualistis, memiliki daya saing tinggi agar mampu menjadi pemenang dan mengalahkan pesaing lainnya (siapapun itu) menjadi arah perilaku dari berbagai pihak. Ada pemenang (*the winner*) dan pecundang (*the loser*). Mereka yang mampu akhirnya memang berhasil mengikuti gaya hidup global, tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki dukungan untuk bisa

mengikuti gaya hidup yang baru. Keadaan ekonomi masih jauh bisa tampil dalam persaingan tersebut. Akibatnya banyak yang menempuh jalan pintas. Korupsi, kolusi, koncoisme dan nepotisme dilakukan dalam berbagai bentuk, yang sama buruknya dengan perilaku menipu, mencuri, merampok dan melacurkan diri.

Manusia tidak lepas dari lingkungannya. Kecenderungan untuk mengikuti gaya hidup yang baru, yang tendy dan menempatkan nilai-nilai baru dalam ukuran keberhasilan telah merusak dan menghancurkan nilai-nilai tradisional yang sebelumnya dipegang teguh dan diyakini sebagai kebenaran. Nilai yang mementingkan kebersamaan dan menumbuhkan sikap gotong royong dilibas oleh nilai individualistis. Nilai yang menempatkan nilai spriritual berganti dengan unsur materi. Sikap yang mementingkan keselarasan dalam kehidupan bersama sebagaimana yang telah mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia, diubah menjadi sikap yang selalu mau bersaing dan memenangkan persaingan tidak peduli caranya dan siapapun yang dihadapi.

Dalam periode ini semua pihak, mau tidak mau, suka tidak suka, seolah dipaksa masuk ke dalam pembentukan perilaku persaingan global. Namun di sisi lain, pada saat yang bersamaan tidak ingin meninggalkan cita-cita bangsa, yaitu terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial. Sementara antara keyakinan terhadap nilai-nilai tradisional dan kenyataan serta keamanan, yang pernah diberikan dalam cara kehidupan yang menjunjung tinggi kebersamaan dengan kehidupan sistem kapitalis melahirkan konflik-konflik pribadi

yang cukup tajam pengaruhnya dalam proses pembentukan perilaku. Masyarakat.

Bayang-bayang kehidupan masyarakat dalam masa orde baru dengan berbagai benturan kepentingann dan kebutuhan itulah yang kemudian memunculkan era reformasi, yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari jabatan selaku Presiden RI setelah berkuasa 32 tahun. Wajah masyarakat muncul beraneka ragam. Berbagai bentuk perilaku tampak mencerminkan kondisi dan situasi yang dimiliki masing-masing baik sebagai individu maupun kelompok yang semula ditekan kuat-kuat agar tidak muncul ke permukaan dan tidak menimbulkan konflik terutama bagi mereka yang berbeda pendapat. Demonstrasi, pembentukan partai-partai baru, penjarahan, perkosaan, doa bersama, tuding-tudingan, menghujat dan dihujat mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Negeri seribu pulau dengan nyanyian nyiur melambai yang melambangkan kenyamanan dan kedamaian seolah terpuruk menagisi nasib bangsa dan negara yang carut marut karena kepentingan dan kebutuhan. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang dirasakan dalam keadaan terpuruk ini menjadi bertambah sulit proyeksinya ke depan karena perilaku yang tampil di masyarakat tidak lagi mencerminkan kepedulian terhadap hukum dan aturan kehidupan bersama yang menimbulkan ketentraman dan kenyamanan.

MAKNA HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERILAKU

Hukum dapat mengarahkan masyarakat kearah pembentukan perilaku yang sesuai dengan ketentuan mereka untuk dapat menghadapi

berbagai tantangan, sekarang dan di masa yang akan datang. Ditinjau dari budaya hukum, yaitu bagaimana masyarakat mempersepsi hukum, maka secara umum hukum dipersepsikan sebagai;

- a. Suatu tatanan normatif dalam kehidupan bernegara
- b. Berfungsi mengatur kehidupan warganegara dengan memberikan batasan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan
- c. Bertujuan melindungi tiap warga negara dalam mengacu pada nilai-nilai dasar seperti kemanusiaan dan keadilan
- d. Ditetapkan oleh otoritas yang legitimasinya diakui oleh seluruh warganegara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari sudut perilaku masyarakat, maka hukum memiliki dua fungsi, yaitu;

- a. Memantapkan pola perilaku masyarakat yang sudah ada dan ingin dipertahankan, dan atau
- b. Mengubah pola perilaku masyarakat yang ada saat ini ke arah perilaku baru yang dicita-citakan.

Setiap masyarakat diharapkan bisa secara mandiri memahami makna dan tujuan ditegakannya hukum, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlalu memerlukan pengawas. Salah satu ciri kemandirian adalah kemampuan memilih yang benar dari yang salah berdasarkan norma dan aturan yang berlaku di satu tempat dalam kurun waktu tertentu dan hal ini memerlukan proses.

Menurut Lawrence Kohlberg ada tiga tahapan pokok yang dilalui seseorang untuk mampu bersikap adil dan mengembangkan sikap dan perbuatan berdasar pertimbangan moral, yaitu;

- a. **Moralitas Prakonvensional.** Pada tahapan ini dasar yang menjadi pertimbangan dalam bersikap dan bertingkah laku adalah pujian dan hukuman yang diberikan oleh lingkungan. Tingkah laku yang diancam hukuman tidak akan diulangi lagi. Sebaliknya perbuatan yang mendatangkan pujian atau hadiah akan cenderung diulang.
- b. **Moralitas konvensional.** Pada tahapan ini perilaku sudah lebih disesuaikan dengan norma yang dianut dalam lingkungan sosial tertentu. Sikap dan perilaku diarahkan supaya bisa dikelompokkan sebagai perbuatan seorang anggota atau warga masyarakat yang baik.
- c. **Moralitas Pascakonvensional.** Pada tahapan ini prinsip-prinsip moral digunakan dalam arti luas tidak sekedar hitam putih dan tidak mengacu pada batasan-batasan sempit yang berlaku hanya untuk kalangan masyarakat tertentu.

Perilaku masyarakat terbagi dalam tiga kelompok tersebut, yang dipengaruhi oleh proses perkembangannya. Tingkat kematangan pribadi sangat menentukan moralitas perilakunya. Ada dua mekanisme belajar yang utama dalam membentuk perilaku manusia, yaitu;

1. **Cara belajar instrumental.** Pada dasarnya bahwa suatu perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang positif (reinforcement) akan diulangi, sedangkan perilaku yang diikuti konsekuensi negatif (punishment) tidak akan diulangi.
2. **Cara belajar observasional.** Seseorang dapat mempelajari perilaku baru atau memperkuat perilaku yang sudah dimilikinya

hanya dengan mengamati orang lain (model) melaksanakan perilaku tersebut. Besarnya pengaruh perilaku model terhadap perilaku si pengamat tergantung pada tiga hal, yaitu

- Penilaian pengamat tentang kemampuannya untuk dapat melaksanakan perilaku yang ditunjukkan oleh model
- Persepsi pengamat tentang hasil perilaku yang ditunjukkan model, yaitu apakah menghasilkan konsekuensi positif atau negatif
- Perkiraan pengamat, apakah ia akan menghasilkan konsekuensi yang sama bila ia juga melaksanakan perilaku yang ditunjukkan model.

Bila persepsi masyarakat tentang peranan hukum dikaitkan dengan kedua mekanisme belajar tadi, maka hukum sebenarnya merupakan suatu intruksi atau pemberitahuan dari otoritas yang diakui kewenangannya mengenai;

- a. Perilaku yang dapat diharapkan dari semua individu yang dikenai hukum tersebut
- b. Konsekuensi yang akan dialami individu pelaku bila ia melaksanakan atau menolak melaksanakan perilaku yang dimaksud.

Agar hukum ini dapat berfungsi secara efektif, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu;

- a. Hukum tersebut harus dimengerti oleh individu yang melaksanakannya dan oleh individu yang akan dikenai oleh hukum tersebut,
- b. Konsekuensi dari dipatuhi atau tidak dipatuhinya hukum tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan berlaku umum tanpa pengecualian.

Berbagai hal yang kurang menguntungkan dalam pengembangan perilaku masyarakat yang sadar hukum, sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara masih diperparah lagi dengan adanya dua hal yang sangat berpengaruh dalam pembentukan perilaku, yaitu;

- a. Budaya feodalisme dan paternalistik yang membuka banyak peluang bagi yang berkuasa di berbagai tingkat untuk membuat aturan sendiri atau melakukan interpretasi subyektif terhadap hukum dan perundang-undangan yang ada sehingga peraturan yang sama dapat diartikan berbeda, di wilayah yang berbeda atau dalam kurun waktu yang berbeda.
- b. Adanya kecenderungan budaya untuk menghindari konflik secara terbuka dan mencari jalan kompromi yang menyebabkan orang sering lari ke prosedur penyelesaian konflik alternatif di luar pengadilan, padahal bentuk penyelesaian alternatif ini sangat dipengaruhi oleh kekuasaan atau status dari pihak-pihak yang berperan dalam proses tersebut.

Apa arti kenyataan itu dilihat dari pendekatan belajar dalam rangka pembentukan perilaku, menurut mekanisme belajar intrumenal atau observasional/

- a. Kenyataan bahwa seringkali ada peraturan-peraturan yang bertentangan atau tidak konsisten satu dengan yang lain akan menimbulkan kebingungan baik di tingkat pelaksanaan maupun pada mereka yang dikenai oleh peraturan tersebut.
- b. Adanya penerapan hukum yang berbeda. Tergantung pada status dan kekuasaan orang yang ikut dalam proses pelaksanaannya

maupun pada status dan kekuasaan individu yang dikenai hukum tersebut.

- c. Kenyataan bahwa orang yang memiliki kekuasaan seringkali mendapatkan perlakuan yang menguntungkan (reinforcement) secara konsisten akan menjadikannya sebagai model bagi para pemegang kekuasaan pada tingkat yang lebih rendah.

Berkaitan dengan masalah ini perlu dipahami bahwa betapapun bagusnya rencana, sistem, maupun kelembagaan yang diciptakan, kemungkinan berhasilnya akan sangat kecil tanpa didukung oleh perubahan yang mendasar dalam pola pikir, sikap dan perilaku pada tingkat individu sebagai anggota masyarakat. Ada dua alternatif keadaan masyarakat Indonesia berdasarkan analisis tersebut, yaitu;

- a. Menjadi bangsa yang mengalami "*learned helplessness*", apatis, tidak percaya diri dan tidak mampu bersaing di tatanan global, atau
- b. Menjadi bangsa yang memiliki "*self efficacy*", percaya diri, dan mampu bersaing di tatanan global.

Indonesia sebagai bangsa dan negara, juga secara individual memiliki dua pilihan tersebut. Namun, bila dilihat dari sudut belajar observasional di mana unsur keteladanan (*referent power*) memegang peranan penting dalam mengubah perilaku, maka sikap pemimpin bangsa dan negara ini menjadi sangat bermakna. Semakin tinggi status seseorang dan semakin besar kekuasaan/pengaruhnya, maka semakin menentukan pula pilihannya bagi masa depan bangsa.

PENGEMBANGAN POLA PERILAKU MANUSIA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI

Ada dua kemungkinan pembentukan pola perilaku manusia Indonesia dalam memasuki abad 21, yang diwarnai oleh latar belakang sejarah bangsa dan negara selama ini, yaitu:

- a. menjadi bangsa yang memiliki *self efficacy*
- b. menjadi bangsa yang mengalami *learned helplessness*

Era reformasi membukakan kenyataan, betapa banyak unsur penting lainnya dalam upaya pengembangan manusia Indonesia yang seolah terlupakan dalam membangun bangsa dan negara di masa orde baru, yang antara lain menjadi penyebab munculnya KKN. Kesadaran tersebut mendorong keinginan untuk membenahi perilaku manusia Indonesia dari sikap yang cenderung KKN menjadi perilaku yang ***bersih, transparan, profesional***. Keinginan untuk memunculkan manusia Indonesia yang bersih, transparan dan profesional dalam menjalankan kehidupannya sangat diperlukan, ***apapun yang dilakukannya, dimanapun posisinya***. Kehidupan abad 21 menyiratkan tantangan yang lebih luas dalam berkompetisi di era globalisasi. Pengembangan perilaku bersih, transparan dan profesional menjadi persyaratan bagi manusia Indonesia agar bisa berkualitas tinggi dan mampu mengambil posisi dalam persaingan kancah dunia dan memanfaatkannya dengan baik, sebaliknya perilaku KKN harus ditinggalkan.

Pemahaman diri sebagai manusia Indonesia perlu dimiliki agar dapat menempatkan diri dan mengembangkan hubungan dengan

lingkungan, baik dalam skala kecil maupun perbatasan lebih luas. Negara dan bangsa memerlukan manusia Indonesia yang mencerminkan pandangan, sikap dan perilaku warga negara Republik Indonesia (siapa pun dia, dari kelompok manapun -etnik, kelas sosial, agama, pendidikan, kemampuan ekonomi). Era globalisasi yang semakin terasa denyutnya memerlukan penampilan manusia Indonesia yang berkualitas tinggi, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia, yang selanjutnya akan dapat menghasilkan peran serta aktif di berbagai bidang (pertanian, perindustrian, teknologi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya).

John.J.Macionis (2010) mengemukakan bahwa abad 21 menyiratkan ketidakjelasan terhadap ukuran keberhasilan yang bisa dijadikan keteladanan. Sukar sekali menutupi kejadian yang tak ingin disebarluaskan baik untuk pertimbangan menghormati hak azasi manusia maupun karena kecanggihan teknologi komunikasi. Banyak masalah yang harus dijawab dalam memasuki abad 21, antara lain merumuskan makna kehidupan, pemecahan sengketa/konflik antar bangsa/negara, pengentasan kemiskinan yang tidak hanya terkait dengan masalah populasi (pertambahan penduduk) dalam hubungannya dengan ketersediaan sumber daya alam yang makin terbatas. Abad 21 mensyaratkan perlunya wawasan pikir lebih luas, imajinasi, rasa kasihan atau simpati, dan keteguhan hati. Pemahaman yang luas terhadap kehidupan bersama akan menjadi dasar yang kuat bagi upaya membantu manusia memasuki abad 21 dengan sikap optimis.

Ada lima cara yang dikemukakan Macionis dalam

pembentukan perilaku yang mencerminkan pemahaman sosialisasi, yaitu;

- a. teori Id, Ego, Superego dari Sigmund Freud (1856-1939)
- b. teori Perkembangan Kognitif dari Piaget (1896-1980)
- c. teori Perkembangan Moral dari Laurence Kohlberg (1981)
- d. teori Gender dari Carol Gilligan (1982)
- e. teori "Social Self" dari George Herbert Mead (1863-1993)

Jalur yang bisa digunakan untuk membentuk perilaku yang mencerminkan kemampuan sosialisasi adalah; keluarga, sekolah, kelompok sebaya, media massa dan opini publik. Sedangkan proses sosialisasi bisa berlangsung sepanjang kehidupan, yakni sejak kanak-kanak, pra remaja, remaja, dewasa, lanjut usia.

Harapan untuk dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan perilaku manusia Indonesia abad 21 yang berkualitas tinggi bisa mengacu pada kerangka pikir tersebut (untuk pemahaman, proses dan pembentukan perilaku dalam upaya sosialisasi), terutama dalam upaya membentuk manusia yang cerdas, terampil, tangguh, mandiri, berdaya saing tinggi, tapi juga punya hati nurani, yang membuatnya peduli dan tidak individualis. Untuk itu perlu dipahami kondisi masyarakat Indonesia saat ini..

Berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg, masyarakat Indonesia terbagi dalam tiga kelompok moralitas.

Kelompok pertama menyandarkan perilakunya pada pengertian benar dan salah, baik dan buruk berdasarkan reaksi yang diterimanya dari lingkungan. Bagi kelompok ini, keputusan baik dan buruk, benar dan salah harus dipahami

secara nyata., bukan sesuatu yang bersifat abstrak. Bentuk hukuman dan dan pujian/ penghargaan harus dipahami sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, antara lain taraf kecerdasannya. Penempatan patung polisi di berbagai kota adalah contoh pemahaman ‘hitam putih’ dalam upaya pengawasan prilaku. Kehadiran polisi secara fisik (terlihat) menjafi penting daripada hanya sekedar penempatan rambu lalu lintas. Kelompok ini lebih terfokus pada pikiran dan pertimbangannya sendiri, menggunakan ukurannya sendiri dan tidak terlalu mampu mempertimbangkan dalam perspektif yang lebih luas.

Kelompok kedua lebih luas pandangannya sehingga pemahaman terhadap norma dalam kehidupan bersama, yang mengacu pada kehidupan bersama bisa diharapkan. Kepedulian dan kebutuhan mendapatkan predikat sebagai warga masyarakat yang baik sudah dimiliki.

Kelompok ketiga memiliki tingkat pemahaman dan kesadaran lebih tinggi mengenai perlunya norma dalam kehidupan bersama agar dapat mencapai rasa aman dan nyaman. Pengelompokan ini seharusnya dijadikan patokan dalam mengembangkan aturan berikut sanksinya. Meskipun secara umum tetap bersumber pada acuan hukum yang sama, tetapi dalam penyampaian informasi dan terapannya perlu memperhatikan psikologis masing-masing kelompok, sehingga bisa diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Bagi masyarakat Indonesia yang secara mayoritas mencerminkan pola patrilineal, adanya figur yang bisa dijadikan pegangan menjadi sangat penting. Figur tersebut harus dapat mencerminkan tokoh yang dikagumi

dan bisa dipercaya, yang antara lain bisa dilihat dari sikap dan prilakunya dalam kehidupan keseharian sebagai pribadi maupun dalam melaksanakan tugasnya. Perasaan diperlakukan secara adil, yang antara lain merasa memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum menjadi syarat utama bagi tumbuhnya kepercayaan kepada pimpinan negara dan aparat penegak hukum, Segala bentuk kekecualian akan mengurangi bobot aturan yang ditetapkan. Apalagi kalau figur yang seharusnya menjadi panutan ternyata menampilkan prilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Bentuk masyarakat Indonesia yang sangat heterogen juga harus diperhatikan. Sejalan dengan itu, maka penyusunan undang-undang dan peraturan penjelasan serta kelengkapannya harus disampaikan dalam bentuk komunikasi yang efektif, sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok.

Untuk bisa menjaga agar prilaku masyarakat tetap produktif dalam upaya menegakkan kewibawaan pemerintah, ketertiban dan ketentraman bersama, masyarakat yang seolah baru terbangun dan mulai sadar atas hak-haknya sebagai individu maupun sebagai warga negara, yang kemudian memunculkan berbagai bentuk prilaku ‘terkejut’ harus segera diarahkan dan dibimbing, sehingga reformasi bisa tetap sesuai dengan jiwanya ketika diperjuangkan oleh mahasiswa. Perilaku beberapa pihak yang saling tunjuk, saling menghujat, saling menghakimi, tanpa mengindahkan prosedur hukum/tatanan yang berlaku perlu segera diatasi, sebelum menyedatkan masyarakat dalam pengembangan pola pikir dan tindakan yang jauh dari kehidupan yang sadar hukum.

Pemulihan kepercayaan masyarakat tidak hanya diperlukan untuk mengembalikan kondisi dalam negeri, tetapi juga bagi dunia internasional dalam menentukan sikap dan kebijaksanaan politik maupun ekonomi terhadap Indonesia. Beban psikologis ini sangat berat. Persoalannya adalah seberapa jauh pemerintah dan seluruh jajarannya menyadari hal ini? Apakah masyarakat juga bisa melihat persoalan ini dalam skala pikir yang lebih luas dari hanya sekedar memikirkan kepentingannya sendiri? Dapatkah mereka melihat dirinya sebagai bagian dari kepentingan bersama sebagai anggota masyarakat dan warga negara? Pemerintah dan warga masyarakat harus bersama-sama menyelesaikan persoalan ini sebagai kepentingan yang tidak bisa ditawar untuk mempertahankan keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara. Untuk itu perlu dimasyarakatkan secara luas dan terbuka mengenai kondisi dan situasi yang dihadapi bersama agar pemerintah dan masyarakat bisa bahu membahu dalam upaya penyelesaiannya, yang tentunya harus sangat memperhitungkan karakter masing-masing kelompok, sehingga bentuk dan jalur penyampaiannya bisa disesuaikan dan kemudian bisa dipahami sebagaimana mestinya.

Hal lain yang memerlukan perhatian pemerintah untuk dapat memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah adalah koordinasi yang baik antara seluruh aparat/jajaran pemerintah. Pernyataan dan tindakan yang terkesan kontradiktif antar departemen harus dihindarkan. Sebelum memberikan pernyataan baik sebagai tanggapan maupun rumusan kebijakan, seyogyanya sudah ada pemahaman dan kesepakatan di antara para anggota kabinet dan

aparat./jajaran di bawahnya yang terkait. Dengan demikian masyarakat tidak seperti penonton yang kebingungan, sebab tidak ada yang bisa dijadikan pegangan secara jelas, yang akibatnya memunculkan perilaku yang dikembangkan atas interpretasi sendiri. Kondisi ini dapat memunculkan situasi yang rawan bagi kehidupan bersama, sebab tak ada acuan yang jelas dan tak ada kepastian yang bisa dipercaya dan dijadikan pedoman.

Transparansi atau keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan masih perlu dilakukan secara selektif, sesuai karakter masyarakat yang dihadapi supaya tidak berubah menjadi bentuk perilaku yang seenaknya menuntut dan menghujat orang/pihak lain, sedangkan di sisi lain menepuk dada menganggap diri paling benar dan bersih. Kehidupan demokrasi yang sesungguhnya harus dijabarkan secara operasional di tiap tingkatan kemampuan masyarakat dalam memahaminya, sesuai karakter kelompok-kelompok yang ada. Pendekatan persuasif dan tidak sekedar responsif sangat diperlukan, yang bisa dilakukan dalam bentuk pendidikan masyarakat dalam hal kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, yang menyiratkan rasa kebersamaan, bahu membahu, saling isi dan saling melengkapi. Tata kehidupan menurut adat dan agama harus jelas posisinya dalam tatanan hukum negara, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat bisa tertampung dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak yang merugikan kehidupan bersama. Aturan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, kesempatan memperoleh pendidikan/pekerjaan,

kenyamanan dan jaminan keamanan dalam bekerja, corak kehidupan perkawinan/keluarga sesuai kondisi zaman perlu ditelaah untuk bisa memenuhi aspirasi masyarakat.

PENUTUP

Manusia Indonesia abad 21 yang berkualitas tinggi ditandai oleh lima ciri utama dari aspek-aspek perkembangan yang berlangsung secara seimbang dan selaras, yaitu; perkembangan tubuh/fisik, kecerdasan/intelegensia, emosional/afeksi, sosialisasi dan spiritual. Pola perawatan, asuhan, dan pendidikan anak hendaknya mengacu pada upaya pengembangan kelima aspek tersebut secara harmoni dan seimbang agar terbentuk pribadi yang sehat, cerdas, peka (sensitif), luwes beradaptasi dan bersandar pada hati nurani dalam bersikap dan bertindak. Dengan demikian meskipun ia berhadapan dengan gaya hidup global, pijakannya pada akar kehidupan tradisional yang menjadi cikal bakal kehidupan bangsa dan negaranya tidak akan hanyut terbawa arus kehidupan global. Justru ia akan memilih dan memutuskan yang terbaik untuk diri, bangsa dan negaranya. baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Penegakan hukum dan contoh yang diperlukan sebagai modal pembentukan perilaku, baik yang ditunjukkan orangtua maupun masyarakat menjadi penting.

Kerjasama antar disiplin ilmu dalam memecahkan masalah yang dihadapi saat ini sangat diperlukan. Pembangunan harus diarahkan pada cita-cita bangsa dan negara ketika republik ini didirikan, Kebersamaan menjadi penting untuk dapat menjaga kesatuan dan persatuan. Menyadari keterbatasan kemampuan diri sebagai individu dan kelebihan bekerjasama

akan dapat menghindarkan suasana yang saling tuding, saling hujat, saling mencemooh, saling menepuk dada, saling melecehkan, adu kuasa dan adu kekuatan seperti yang tampak sekarang ini. Selain merugikan kehidupan bangsa dan negara, memunculkan ancaman perpecahan, perilaku tersebut tidak akan menempatkan individu dalam proses belajar memahami dan menaati hukum. Padahal era globalisasi di abad 21 akan menghadapkan manusia Indonesia pada hukum dan tatanan kehidupan bersama yang lebih luas, tidak hanya dalam batas wilayah Republik Indonesia. Perilaku sadar hukum adalah sebagian dari persyaratan yang diajukan abad 21. Siapkah kita membentuknya? Tahukah kita cara membentuknya? Jawaban pertanyaan ini akan menentukan corak individu yang menandai masyarakat Indonesia abad 21, Apakah kita akan menjadi bangsa yang mengalami "learned helplessness", apatis, tidak percaya diri dan tidak mampu bersaing di tatanan global atau menjadi bangsa yang memiliki self-efficacy, percaya diri dan mampu bersaing dalam tatanan global.

Agar bangsa dan negara kita tidak semakin terpuruk karena terpaksa mengalami "learned helplessness" seharusnya pemerintah dan masyarakat mampu menumbuhkan motivasi berprestasi tinggi atau dikenal sebagai need for achievement (McClelland). Menurut teori Maslow, manusia Indonesia harus didorong sampai pengembangan motivasi untuk mampu mengaktualisasi diri dan tidak terhenti pada motivasi pemenuhan kebutuhan yang mendasar saja.

Dalam kaitan dengan pembangunan selanjutnya, ada pertanyaan yang masih harus dijawab,

terutama mengacu pada pengalaman kita selama ini, akankah kita masih terkotak-kotak dalam menyelenggarakan pembangunan?

Dapatkah kita menempatkan manusia sebagai individu dengan segala keunikannya sehingga tidak memperlakukannya sebagai obyek semata? Atau kita masih tetap beranggapan bahwa masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu adalah sekedar obyek, yang bisa diatasi dengan *dua k* yaitu kekuatan dan kekuasaan. Kalau jawabannya ya, maka cita-itanya untuk mewujudkan manusia Indonesia abad 21 yang berkualitas tinggi barangkali cuma angan-angan, seperti membangun rumah di atas angin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan(2010), *Sosiologi Komunikasi*, Edisi Pertama, Cetakan ke-5, Jakarta, Kencana
- Horton, Paul B & Chester I Hunt(2012), *Sosiologi*, Edisi Terjemahan, Cetakan ke-12, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Macionis, JJ (2010), *Society, The Basics*, edisi terjemahan, Jakarta, PT Rajawali Pers
- Poloma, Margaret M(2010), *Sosiologi Kontemporer*, cetakan ke 15, Jakarta, Rajawali Pers
- Wirawan, Sarlito(2012), *Pengantar Psikologi Umum*, edisi 3. Jakarta, Rajawali Pers